

1. MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH, RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
 2. MEMPERKUAT KEMAMPUAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH

RPJM

Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pesisir Selatan
 Indikator : 1. Nilai Investasi PMA dan PMDN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Terwujudnya Iblim Investasi yang Kondusif
 Indikator : Peningkatan Jumlah Izin yang diterbitkan di Kabupaten Pesisir

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian
 Indikator : Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM

Peningkatan Pelayanan Perizinan

Indikator : Persentase izin yang diterbitkan

kegiatan
 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 indikator : Hasil survey Kepuasan Masyarakat

Peningkatan pengelolaan data perizinan yang terintegrasi

Indikator : Jumlah Pengelolaan data perizinan per sektor

kegiatan
 Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 indikator : Persentase perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

Peningkatan Peluang Investasi Daerah

Indikator : Persentase Pemuktahiran peta potensi dan peluang investasi

kegiatan
 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal

Peningkatan Pengendalian Investasi Daerah

Indikator : Persentase penyelesaian investasi yang bermasalah

kegiatan
 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif
 Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan

Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas dokumen Perencanaan dan Kepegawaian OPD

Indikator : Peningkatan Nilai Evaluasi Sakip dan Sasaran Kinerja Pegawai

Tersedianya sistem informasi Pelayanan online

Indikator : Persentase pelayanan perizinan online

kegiatan
 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 indikator : Jumlah Perizinan yang diterbitkan

Tersedianya regulasi pelayanan perizinan

Indikator : standar operasi/ prosedur (SOP) pelayanan

kegiatan
 Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang PM yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Tersedianya regulasi investasi daerah

Indikator : Jumlah regulasi yang mempermudah investasi

kegiatan
 Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidangh PM
 indikator : Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur promosi PM

Meningkatnya pelaksanaan pemantauan dan pengawasan

Indikator : Jumlah permasalahan yang terselesaikan

kegiatan
 Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan PM
 indikator : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan PM

Tersedianya Dokumen Keuangan dan Perencanaan yang akurat dan akuntabel

Indikator : Jumlah Penyampaian Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang tepat waktu

Tersedianya fasilitas pelayanan perdagangan perizinan

Indikator : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan

kegiatan
 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 indikator : Jumlah pedagang yang terselesaikan

Tersedianya data dan informasi perizinan dan Non Perizinan

Indikator : Jumlah data perizinan yang valid

kegiatan
 indikator : Peningkatan peluang investasi Daerah

Terlaksananya promosi peluang investasi

Indikator : Jumlah calon investor yang difasilitasi

kegiatan
 Penyusunan strategi promosi PM
 indikator : Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota

Meningkatnya fasilitas penyelesaian PM

Indikator : Persentase rekomendasi penyelesaian pengaduan

kegiatan
 Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan PM
 indikator : Terselenggaranya survey dan pembinaan terhadap calon PM

Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Pegawai pada OPD

Indikator : Persentase Pengetahuan Disiplin Kepegawaian

